

TANTANGAN BIROKRAT YANG BAIK *

Saya Samsul Bahri (bukan nama sebenarnya), pada tahun 2002 menjabat sebagai Kepala Bidang Prasarana Fisik di Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tugas yang saya harus emban adalah mewakili Pemkab dalam urusan pengadaan barang, terutama tanah, gedung serta berbagai bentuk aset lainnya. Saya tidak mengira bahwa dalam tugas saya yang kelihatannya sangat teknis ternyata harus menghadapi berbagai persoalan di tingkat politik yang sangat pelik dan penuh risiko. Termasuk diantaranya adalah harus menghadapi persoalan dengan Bupati, yang ketika itu dijabat oleh Syaukani Hasan Rais serta seorang anggota dewan dari partai Golkar yang berpengaruh, yaitu Saleh Maktab.

Tokoh politik daerah

Bupati Syaukani HR, lebih terkenal di Kutai Kartanegara (Kukar) dengan sebutan Pak Kaning, adalah seorang tokoh yang sangat dikagumi di tingkat kabupaten maupun di tingkat kawasan Kalimantan. Memulai karir politiknya setelah sukses menjadi pengusaha, Syaukani adalah salah satu tokoh partai Golkar yang merupakan pelopor dibentuknya APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) perhimpunan kepala daerah yang dibentuk pada awal tahun 1999. Pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Syaukani adalah salah satu tokoh yang sangat vokal menentang upaya resentralisasi yang ketika itu sudah dijamin dengan UU No.22 tahun 1999.

Ketika pada masa krisis ekonomi kebanyakan bupati dan walikota di daerah memilih untuk berkonsentrasi membangun kembali ekonomi rakyat yang terpuruk dan tetap diam berhadapan dengan pemerintah pusat, Syaukani adalah salah satu tokoh otonomi daerah yang dengan lantang memperjuangkan diberikannya DBH (Dana Bagi Hasil) bagi daerah-daerah penghasil minyak secara transparan dan konsisten. Bersama-sama dengan Walikota Pekanbaru Tabrani Rab dan banyak bupati dari daerah penghasil minyak yang tergabung dalam FKDPM (Forum Komunikasi Daerah Penghasil Minyak), Syaukani dengan gigih memperjuangkan hak-hak daerah untuk memperoleh 15% dari DBH minyak bumi sejalan dengan kebijakan desentralisasi.

Saleh Maktab adalah fungsionaris aktif partai Golkar dan menjadi anggota DPRD periode 1999-2004 dan duduk di Komisi B yang membidangi urusan pembangunan. Saleh adalah seorang politisi yang memulai karir dari bawah. Pernah menjadi guru sekolah dasar, kepala sekolah dan akhirnya menjadi Pengawas Dewan Sekolah sebelum terjun ke politik. Kedudukan sebagai pegawai negeri akhirnya ditinggalkannya karena ingin aktif sebagai fungsionaris di partai Golkar. Saleh diuntungkan karena latar-belakangnya yang asli dari Tenggarong (ibukota Kutai Kartanegara) membantunya untuk meyakinkan konstituen untuk memilih dirinya sebagai anggota dewan. Kontak-kontak pribadinya dengan para pengusaha di daerah juga membuatnya memiliki akses yang besar terhadap sumber-sumber pendanaan politik.

Ambisi politik untuk tetap terpilih dalam masa jabatan anggota DPRD pada periode berikutnya membuat Saleh bertekad untuk mempersiapkan diri sejak awal.

* Diadaptasi dari kasus yang disunting oleh Kenneth Winston dengan judul "The Good Commissioner", Kennedy School of Government, Harvard University, dengan kasus serupa yang terjadi di Indonesia. Akurasi data tidak dijamin dan semata-mata digunakan untuk keperluan pengajaran.

Dia termasuk yang aktif dalam banyak forum DPRD mengajukan berbagai gagasan baru agar DBH minyak yang masuk ke APBD Kukar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Banyak dari para pegawai negeri di Pemda yang sebenarnya tidak begitu menyukai langkah-langkah politiknya karena seringkali berbau kepentingan pribadi. Tetapi Saleh selalu berhasil meyakinkan para warga dan konstituennya, sehingga seringkali muncul berbagai berita di Kaltim Pos dengan judul bernada klaim seperti "Saleh telah memenuhi janjinya", atau "Warga Tenggara perlu orang seperti Saleh".

Salah satu gagasan yang dibuat oleh Saleh adalah rencana pembangunan Bandara Sultan Kutai Berjaya yang berlokasi di Kecamatan Loa Kulu. Argumentasi yang mendasari pembangunan bandara ini cukup masuk akal mengingat bahwa sebagai salah satu kabupaten penghasil minyak terbesar di Kalimantan, kabupaten Kukar belum memiliki bandara sendiri. Kecuali itu, Saleh terus meyakinkan para politisi, pejabat Pemda dan warga bahwa pembangunan bandara ini penting mengingat bahwa Kukar pada tahun 2006 akan menjadi tuan rumah PON (Pekan Olahraga Nasional) yang tentu membutuhkan fasilitas transportasi antar kota yang memadai.

Dinamika Internal Parpol

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar mengadakan konvensi tentang para calon anggota DPRD yang dianggap pantas untuk menjadi anggota dewan pada periode 2004-2009. Sebagaimana biasanya, dua tahun sebelum pelaksanaan Pemilu partai harus sudah mengantongi daftar nama-nama kader politik yang pantas untuk diajukan dalam Pemilu berikutnya. Saleh Maktab pada awalnya sangat yakin bahwa para fungsionaris partai Golkar akan mendukungnya karena dia termasuk orang lama dan sudah cukup dikenal oleh para petinggi partai bukan hanya di tingkat daerah tetapi juga di tingkat nasional.

Namun ternyata hasil konvensi di tingkat DPD Golkar pada tahun 2002 itu menunjukkan hasil yang sungguh di luar dugaan. Dari 11 orang anggota DPRD dari partai Golkar, dia hanya berhasil meyakinkan 4 orang anggota sedangkan 7 suara berpihak ke Edimas Bardan, seorang fungsionaris muda yang tampaknya sedang memperoleh simpati dari para rekan-rekan politisinya di Golkar. Jika dihitung dari besaran Dapil yang terdiri dari 16 kecamatan, Saleh juga hanya mendapatkan suara dari 6 kecamatan.

Hasil konvensi internal partai Golkar itu tentu sangat mengecewakan Saleh Maktab. Kini, dia harus berjuang keras untuk meyakinkan para pimpinan partai Golkar bahwa dia masih dipercaya oleh rakyat. Untuk itu, dia harus membuktikannya melalui hitungan angka BPP (Bilangan Pembagi Pemilih), bukan melalui elit partai. Namun untuk itu dia tetap harus bisa mempertahankan reputasi politiknya dan harus mendapatkan dana kampanye yang cukup untuk membuktikan popularitasnya di mata rakyat. Yang membuat posisi saya sulit sebagai orang pejabat di Pemda ialah bahwa ternyata langkah politik Saleh Maktab itu punya implikasi serius buat saya.

Saleh berpikir bahwa salah satu penyebab dari kegagalannya untuk membangun reputasi politik adalah kelambanan dalam proses pengadaan tanah untuk bandara di Loa Kulu sehingga proyek itu belum juga bisa dimulai, apalagi diwujudkan. Dia sebenarnya sudah mendesak Bappeda, c.q. pejabat Kepala Bidang Prasarana Fisik yang telah saya gantikan, agar pengadaan tanah itu segera direalisasikan dan proyek segera dimulai. Waluyo Jasman, Kabid yang saya gantikan itu kini dimutasi ke jabatan lain yang kurang strategis. Kebanyakan orang mungkin tidak tahu alasan pemindahan Waluyo dari jabatannya itu. Tetapi bagi lingkungan kami di Bappeda, semua orang paham bahwa pemindahan itu atas

permintaan Saleh sebagai tokoh politik yang disegani. Sejak awal menduduki jabatan Kabid Prasarana Fisik, saya sudah langsung mendapat tekanan politik yang begitu besar ini. Bukan saja karena Saleh Maktab tentu akan terus mendesak untuk menyegerakan pengadaan tanah di Loa Kulu tersebut. Sebagian rekan saya di Bappeda juga mengingatkan saya bahwa upaya pengadaan tanah itu juga telah direstui oleh Bupati Syaukani. Tampaknya Bupati juga memang secara pribadi cukup dekat dengan Saleh Maktab sehingga beliau pun bertekad untuk mempercepat pengadaan tanah untuk bandara di Loa Kulu.

Upaya Pengadaan yang Mencurigakan

Langkah Pemda Kukar untuk membeli tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan bandara di Loa Kulu telah dimulai sebelum saya menjabat sebagai Kabid Prasarana Fisik. Surat keputusan itu ditandatangani oleh Bupati dengan dua lampiran yang berisi rencana untuk membeli tanah seluas 256 hektare dari pemilik bernama Ny. Lalita Markhamah di kecamatan Loa Kulu. Saya juga mendapatkan salinan dari surat Dinas Perhubungan mengenai persetujuan rencana pembelian tanah itu beserta notulen rapat teknis Tim Pengadaan Barang dan Jasa. Pada tahun 2001 itu satuan teknis ULP (Unit Layanan Pengadaan) belum terbentuk sebagaimana amanat Perpres No.80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa.

Belakangan, saya mendapat informasi bahwa ternyata status kepemilikan tanah itu sudah beralih ke tiga nama, yaitu: Ny. Selvi Agustina, Ny. Rita Widyasari, dan Ny. Windra Sudarta, ketiganya adalah anak kandung Bupati Syaukani H.R. Dengan alasan yang kurang begitu jelas tampaknya bekas Kabid sebelumnya, Waluyo Jasman, telah mengirimkan surat untuk memastikan status kepemilikan tanah tersebut dan menyelidiki agar tidak terdapat konflik kepentingan. Tetapi rupanya sebelum ada informasi lebih lanjut tentang hasil konfirmasi dan penyelidikan, dia sudah keburu dimutasikan dari jabatannya.

Dari berkas pengadaan yang ada di lemari Waluyo Jasman, saya bisa menangkap bahwa memang ada yang tidak beres dengan dokumen persyaratan untuk pengadaan tanah di Loa Kulu tersebut. Rupanya Waluyo berusaha meyakinkan Bupati untuk menunda proses pengadaan sampai proses peralihan kepemilikan selesai. Tetapi tampaknya Bupati belum sempat memberikan jawaban yang pasti. Yang rupanya bertindak menggunakan kekuatan politiknya justru Saleh Maktab dengan membuat rekomendasi kepada BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk memutasikan Waluyo karena dianggap tidak becus melaksanakan tugasnya sebagai Kabid di Bappeda. Saya tidak begitu yakin mengenai apa yang dilakukan oleh Waluyo dalam hal ini. Namun yang jelas disamping saya mendapatkan surat rekomendasi penundaan pengadaan tanah, saya juga mendapatkan pernyataan tertulis Waluyo bahwa tanah itu sudah "sangat layak sebagai lokasi pembangunan bandara". Terlampir di dalam surat pernyataan Waluyo itu adalah batas-batas tanah dan laporan survai dari BPN.

Pengamatan fisik yang saya lakukan terhadap tanah itu sendiri memang membuat saya semakin curiga. Jaraknya begitu jauh dari kota dan fasilitas penunjang yang ada disekitar lokasi tanah itu juga masih sangat minim. Belum ada jalan masuk yang representatif untuk masuk ke lokasi. Saya harus memarkir kendaraan saya sekitar 4 km dari lokasi dan berjalan sekitar 45 menit untuk bisa mencapai lokasi tanahnya. Kalaupun tanah ini akan dijadikan sebagai bandara, mungkin akan begitu banyak fasilitas tambahan yang juga harus dibangun, termasuk akses ke jalan utama, fasilitas pengisian bahan bakar, beserta prasarana yang lain seperti parkir, sarana telekomunikasi, dan sebagainya. Saya juga mendapati bahwa luas tanah setelah diukur hanya 194 hektare, bukan 256 hektare seperti terdapat di

dalam berkas laporan sebelumnya. Di luar banyak kejanggalan teknis ini, tentu saja orang masih bisa berargumentasi apakah memang fasilitas bandara di Loa Kulu ini benar-benar merupakan prioritas pembangunan yang diperlukan bagi warga Kukar yang banyak diantaranya masih dililit dengan kemiskinan.

Bagi Pemda sendiri, tidak akan mudah untuk meneruskan pengadaan tanah untuk bandara serta membangun jalan tembus sepanjang sekitar 3 km untuk mencapai kawasan ini. Prosesnya akan sangat panjang dan mungkin rakyat pun tidak akan mendapatkan manfaat optimal dari pembangunan bandara ini. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa proses pengadaan ini akan membuat beberapa orang memperoleh keuntungan buat dirinya sendiri.

Taktik Penundaan

Saya memutuskan untuk tidak akan menyetujui langkah pengadaan ini. Tapi bagaimana mungkin saya melakukannya ketika harus berhadapan dengan Bupati saya sendiri dan seorang politisi yang tidak segan-segan menggunakan pengaruh dan kekuasaannya? Dari pengalaman Waluyo Jasman, tentu tidak mudah menolak perintah dari Bupati atau dari seorang anggota DPRD. Maka, langkah yang saya ambil adalah tetap memperlihatkan persetujuan saya dengan langkah pimpinan dan menunjukkan beberapa hal mengenai masalah legalitas dari tanah ini pada saat yang tepat nanti.

Saya tetap memerintahkan untuk melakukan survai dan penyidikan atas status tanah ini sebagaimana telah diputuskan oleh pendahulu saya. Saya juga menambahkan bahwa karena tanah yang dimaksud tersebut terletak di lokasi yang jauh dan kondisinya berbukit-bukti, penting untuk melakukan survai yang cermat. Saya mengirim surat ke Bakosurtanal untuk memperoleh informasi lengkap tentang keadaan kontur tanah serta kondisi struktur tanah di Loa Kulu, dengan alasan untuk memastikan bahwa tanah tersebut memang layak untuk digunakan sebagai bandara. Sejak awal saya sudah bisa memastikan bahwa Bakosurtanal tidak akan punya data serinci itu untuk wilayah di kecamatan terpencil seperti Loa Kulu. Setelah dua bulan, saya memperoleh jawaban dari Bakosurtanal bahwa mereka tidak punya Tupoksi untuk mendata struktur tanah seperti itu.

Selanjutnya, saya juga mengirim surat ke BPN pusat di Jakarta untuk mendapatkan ijin pengadaan. Sekitar satu bulan setelah itu, saya memperoleh jawaban dari BPN dengan keterangan yang sebenarnya sudah bisa saya perkirakan. Mereka mengatakan bahwa BPN hanya bertugas untuk mendata kadaster tanah, batas-batas legalnya, dsb, tetapi bukan soal kontur, struktur tanah atau kelayakannya bagi pembangunan fasilitas umum. Sementara itu, suatu ketika saya bertemu Saleh Maktab dalam sebuah forum investasi daerah di Pemda. Sambil membicarakan mengenai masalah-masalah pembangunan di Kukar, dia menanyakan kemajuan dari proses pengadaan tanah di Loa Kulu. Saya menjawab bahwa saya mendukung kebijakan itu dan prosesnya terus mengalami kemajuan, tetapi saya tidak memberitahu detail prosesnya. (Saya berasumsi bahwa Saleh baru akan bertindak menyudutkan saya hanya setelah dia yakin bahwa saya punya niat untuk menolak transaksi tanahnya. Tetapi saya kali ini menunjukkan kesan bahwa dengan memutasi saya seperti terjadi pada Waluyo justru akan lebih memperlambat prosesnya).

Saleh menganjurkan agar saya segera menghubungi BPN daerah. Dia mengatakan bahwa setelah otonomi daerah, masalah seperti ini bisa diselesaikan di tingkat daerah dan tidak perlu menunggu surat dari BPN pusat di Jakarta. Tampaknya Ketua Bappeda sebagai atasan saya sudah ditanyai oleh Saleh Maktab tentang kemajuan dari proses ini dan saya tentu harus mengiyakan anjuran darinya.

Saya minta maaf atas keterlambatan ini dengan alasan sebagai Kabid baru harus hati-hati dalam melangkah. Saleh tidak curiga dengan saya dan pertemuan pribadi itu berlangsung mulus. Sejauh ini saya juga belum mendapat perintah dari Bupati Syauckani karena tampaknya beliau tidak ingin menimbulkan kesan adanya intervensi pada masalah pengadaan tanah.

Selang waktu seminggu, Subari Mohtar, Ketua Bappeda dan sekaligus atasan saya mengirim nota dinas yang memerintahkan kepada saya untuk mempercepat proses pengadaan tanah. Saya mencoba mengulur waktu hingga beberapa hari dan sengaja tidak melakukan apapun. Ketika Subari menelepon, saya baru bereaksi dan minta izin untuk menjelaskan masalahnya secara langsung. Di ruang kerjanya, saya mengatakan bahwa dari Kabid sebelumnya terdapat permintaan untuk melakukan penyidikan dan konfirmasi kepemilikan sebelum dilakukan transaksi pembelian tanah. Dia menjawab: "Pak Saleh sudah mulai marah dengan kita semua di Bappeda. Dia mengatakan bahwa kamu tidak becus mengurus masalah ini atau sengaja memperlambat proses pengadaan tanah yang sangat penting ini. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa kita perlu memelihara hubungan baik dengan semua anggota dewan dan saya tidak mau mempertaruhkan nama saya di depan Bupati!". Saya tentu saja hanya bisa mengiyakan perintah atasan saya itu dan berjanji untuk bekerja lebih baik.

Keputusan Kritis yang Sulit

Ketika semua orang tampaknya ingin segera menyelesaikan urusan tanah itu tanpa pikir panjang, posisi saya sebagai seorang pelaksana di Bappeda semakin sulit. Semua pejabat kantor Pemda yang bisa meringankan tindakan saya sudah jelas tidak banyak membantu. Namun setelah beberapa hari saya tidak melakukan tindakan apapun dengan tanah di Loa Kulu itu, saya mencoba untuk menelepon kepala Kantor Pelayanan Pajak di provinsi. Di luar dugaan saya, dia bersedia menemui saya untuk membantu kasus yang saya tangani. Edi Jamaluddin, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, menunjukkan pada saya bahwa status tanah untuk bandara di Loa Kulu itu kepemilikannya memang sudah berpindah. Tetapi yang mencurigakan adalah harga yang disetujui oleh Pemda dan nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang wajar ternyata berbeda sangat besar. Pemda merencanakan untuk membeli tanah itu seharga Rp 15,36 miliar, pada hal NJOP untuk kelas tanah yang sesuai hanya sebesar Rp 3,84 miliar.

Saya mendesak Edi agar membantu saya agar masalah pengadaan tanah ini tidak merugikan rakyat karena harga yang dibeli oleh Pemda terlalu tinggi. Edi menghargai usaha saya itu tetapi terus-terang dia juga mengatakan bahwa dia bukan dalam posisi untuk ikut mengintervensi kebijakan Pemda. Saya tahu bahwa Edi adalah salah satu orang pejabat yang bisa saya percaya, tetapi dia pun mengatakan tidak dapat membantu.

Pada akhirnya, surat perintah resmi dari Ketua Bappeda itu datang. Secara tegas surat Ketua Bappeda itu memerintahkan kepada saya untuk segera menyelesaikan proses pengadaan tanah di Loa Kulu karena "bersifat mendesak untuk keperluan pembangunan fasilitas umum". Saya benar-benar kecewa dengan lingkungan kerja saya. Semua pihak sudah menginginkan transaksi tanah ini dilaksanakan sedangkan begitu banyak fakta yang mencurigakan. Koran lokal juga memberitakan, tentu melalui informasi dari Saleh, bahwa pengadaan tanah itu sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di sekitar Loa Kulu. Semua teman dan bahkan atasan saya sendiri sudah mendesak bahwa transaksi tanah itu segera terwujud. Bagi karir saya sendiri, seandainya saya langsung mengerjakan tugas ini, tentu saya mendapatkan tambahan kondite. Tapi, saya sudah begitu jauh melangkah untuk mencegah transaksi korup ini.

Saya kecewa berat dan sekaligus bingung dengan apa yang harus dilakukan. Apakah semua aparat Pemda sudah sebobrok ini? Di tengah kekecewaan dan kebingungan, akhirnya saya datang ke sekretaris Ketua Bappeda. Saya tanyakan kepada sekretaris mengenai arsip surat Ketua Bappeda yang memerintahkan kepada saya untuk menyelesaikan transaksi tanah di Loa Kulu itu. Tanpa sepengetahuannya, saya mengambil arsip surat itu. Saya yakin bahwa hanya saya dan Ketua Bappeda yang tahu isi surat itu. Bersama-sama dengan surat asli yang sudah saya terima, saya membakarnya! Saya belum pernah melakukan tindakan seperti ini sebelumnya. Tetapi kemarahan dan kekecewaan telah membuat saya melakukannya.

Birokrat vs. Politisi

Sementara status tentang pengadaan tanah masih terhenti, saya mendapatkan surat undangan dari Bupati untuk membahas persoalannya. Undangan dengar pendapat itu disertai dengan lampiran yang berisi permintaan dari DPRD yang ditandatangani Saleh Maktab sebagai ketua Komisi B bidang pembangunan daerah. Berdasarkan protokoler kelembagaan, saya semestinya segera menghubungi Saleh dan meminta petunjuk dari Bupati untuk mempersiapkan dengar-pendapat tersebut. Tetapi saya tidak melakukan hal ini dan tidak tahu apa yang akan menimpa saya kali ini.

Dengan bekal semua dokumen yang ada, dalam pertemuan dengar-pendapat itu saya membeberkan semua yang telah saya lakukan. Saya berusaha meyakinkan bahwa saat ini saya masih menunggu surat perintah resmi dari Bappeda, yang sebenarnya sudah saya hancurkan, atau langsung dari Bupati mengenai pelaksanaan transaksi pembelian tanah Loa Kulu. Di luar dugaan, tampaknya semua pihak masih bisa percaya bahwa saya telah melakukan tugas dengan benar. Setidaknya, itulah kesan yang saya peroleh dari rapat tersebut. Bupati juga mengatakan bahwa urusan pengadaan tanah sekarang ini memang begitu rumit dan memakan waktu. Tetapi saya juga menangkap isyarat bahwa Bupati tidak puas dengan cara kerja saya yang begitu lamban.

Seperti perkiraan saya, Saleh Maktab yang kemudian justru minta untuk bertemu dengan saya secara pribadi. Wajahnya tampak serius dan dia langsung bicara tentang pokok masalahnya. Dia ingin tahu mengapa pengadaan tanah itu terus tertunda ketika semua berkas sudah ada di meja saya. Sekali lagi, saya tunjukkan kepadanya surat saya kepada Bupati yang belum juga mendapatkan jawaban. Dia tampak terkejut. Saya yakin bahwa dia sudah meminta Bupati atau Ketua Bappeda untuk memerintahkan saya supaya segera menyelesaikan transaksi tanah. Setelah berhasil menguasai keterkejutannya, Saleh bertanya apakah saya paham tentang pentingnya transaksi tanah ini bagi citra Bupati dan peningkatan investasi ke Kukar. Tanpa ragu-ragu dia juga menanyakan terus terang apakah saya keberatan dengan akuisisi tanah tersebut. Saya jawab: "Tidak. Saya siap menjalankan tugas, dan saya hanya menunggu surat perintah dari Gubernur, Bupati atau atasan saya". Lalu Saleh mengatakan untuk mendapatkan surat perintah bukan hanya dari Bupati tetapi juga dari Gubernur Kaltim dan segera mengirimkannya ke saya.

Di akhir pertemuan empat-mata tersebut, dia menyebutkan bahwa waktu untuk menyelesaikan transaksi itu tinggal kurang dari dua bulan lagi. Dia menyebutkan tentang jadwal Pemilu Legislatif pada bulan Juli 2004, dan sekarang sudah pertengahan bulan Mei. Dia terus-terang mengatakan bahwa pengadaan tanah itu sepenuhnya sudah disetujui oleh Bupati sedangkan program pembangunan

bandara Loa Kulu itu diharapkan akan sangat bermanfaat bagi semua rakyat Kukar. "Ini semua untuk rakyat Kukar, termasuk kamu juga", katanya meyakinkan saya ketika mengakhiri pembicaraan. Nah, pada akhirnya saya bisa mencium kepentingan politik Saleh yang sesungguhnya. Dia ingin mendapatkan bagian yang tentunya cukup besar dari transaksi tanah Loa Kulu itu untuk mendanai kampanye politiknya. Entah berapa persen yang dijanjikan oleh Bupati kepadanya. Secara tidak langsung dia juga mengatakan bahwa seandainya dia terpilih kembali sebagai anggota dewan, tentu dia akan membantu mempromisikan saya dalam jabatan yang lebih tinggi, mungkin sebagai Ketua Bappeda? Saya tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya.

Saya mendapatkan surat dari Gubernur setelah seminggu rapat dengar-pendapat di gedung DPRD. Saya segera memasukkannya ke berkas-berkas agenda pengadaan prasarana, dan saya menuliskan pesan di *filing cabinet* di ruang saya: "Tolong ingatkan saya tentang agenda ini setelah saya kembali dari cuti". Saya simpan surat dan berkas tersebut selama beberapa hari sambil menyiapkan permohonan cuti tahunan saya. Sudah saya putuskan mengambil cuti sebulan penuh di kampung halaman saya di Padang Pariaman dan saya pesan kepada sekretaris bahwa saya tidak ingin ditelepon atau diganggu dengan pekerjaan kantor. Permohonan cuti saya kebetulan diijinkan oleh Kabag Kepegawaian yang tampaknya tidak tahu apa yang terjadi di rapat dengar-pendapat itu. Sebenarnya saya bisa saja mendelegasikan soal berkas ini kepada Kepala Seksi atau anak-buah saya yang lain di Bappeda. Tetapi pasti anak-buah saya itu akan mendapatkan tekanan politik dari banyak pihak dan saya tidak mau itu terjadi. Karena itu, saya benar-benar berpesan kepada sekretaris dan semua anak-buah untuk tidak menyentuh soal ini sampai saya kembali dari cuti.

Sambil menyiapkan liburan bersama anak-isteri, saya mengirimkan berkas-berkas rencana pengadaan lahan bandara Loa Kulu kepada Perwakilan BPK di Kaltim. Saya betul-betul mencermati semua dokumen ini sebelum saya kirimkan ke BPK. Saya tidak ingin ada yang tercecer dan di kemudian hari merugikan posisi saya. Tentu saja saya sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan buruk dalam karir saya, termasuk untuk berhenti sebagai pegawai negeri dan memulai pekerjaan di swasta. Entah apa yang nanti akan saya lakukan kalau benar-benar dipecat sebagai pegawai negeri.

Dari tempat saya menghabiskan cuti tahunan bersama keluarga di Pariaman, saya sempat menelepon ke salah seorang kawan di Bappeda. Dia kaget dan langsung berkata: "Kamu gila! Ada tekanan luar-biasa sejak seminggu pertama kamu cuti agar kamu batalkan rencana cuti itu, memindah atau memecat kamu. Tapi sejauh ini saya belum mendengar bahwa Pak Saleh meminta BKD untuk memutasikan kamu". Tentu saja saya bisa paham betapa geramnya para tokoh politik itu pada saya. Tetapi mereka tidak akan mungkin bergerak karena semua berkas ada di tangan saya dan saya memilih untuk tetap menikmati cuti tahunan saya.

Saya kembali ke kantor setelah sebulan, dan sekitar tiga minggu kemudian saya mendapat surat bahwa saya dipindahkan dari jabatan sebagai Kabid untuk menjadi seorang Kepala Seksi di Badan Diklat Provinsi. Calon pengganti saya adalah Parulian Ginting, kebetulan adalah juga orang Bappeda dan salah satu teman baik saya. Melalui telepon saya hubungi dia untuk meminta waktu beberapa minggu menyelesaikan masalah ini sampai jadwal Pemilu 2004 berakhir, dan dengan senang hati dia menyetujuinya. Saya berhasil menunda rencana Saleh Maktab untuk mengambil untung dari pengadaan tanah di Loa Kulu. Selama beberapa minggu terakhir saya menjabat sebagai Kabid di Bappeda, tidak ada lagi tekanan yang saya terima. Calon pengganti saya rupanya tahu apa yang terjadi dengan kasus Loa Kulu. Saya berjanji bahwa saya akan menyelesaikan kasus ini dengan penuh tanggung-

jawab dan dia tidak perlu lagi terbebani karenanya. Saya mempersiapkan tujuh halaman laporan kepada Pemkab Kukar dengan semua alasan mengapa pemerintah harus membatalkan atau sedidaknya menunda transaksi tanah itu. Secara implisit saya mengatakan bahwa rekomendasi dari Komisi B DPRD untuk membeli tanah di Loa Kulu harus disertai dengan alasan yang tepat karena ini menyangkut investasi yang begitu besar. Saya juga sebutkan data mengenai peralihan hak milik tanah serta data NJOP yang banyak tidak masuk akal. Saya mengirimkan laporan itu sehari sebelum meninggalkan kantor pada tanggal 30 Juni 2004.

Kejadian Berikutnya

Parulian Ginting, Kabid pengganti saya, tidak meneruskan transaksi tanah Loa Kulu tersebut. Dia mengutip laporan dinas saya dan mengirim surat meminta tanggapan Bupati. Tentu saja Bupati dalam posisi yang sulit karena saya sengaja telah memperlihatkan tendensi skandal dan menyertainya dengan data-data yang begitu akurat. Parulian memang mendapatkan tekanan dari Saleh Maktab untuk bertindak menyelesaikan transaksi tanah. Tetapi dia tetap menolaknya karena merasa belum mendapatkan perintah resmi dari Bupati. Sementara itu Bupati dan Sekda tidak bisa mengambil posisi yang jelas karena tidak ada pejabat Pemda yang mau mengambil risiko. Parulian akhirnya juga dimutasi karena dianggap tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik.

Namun penggantinya pun tidak bisa melakukan apapun dengan berkas pengadaan Loa Kulu karena KPU telah mengedarkan surat tentang pelaksanaan Pemilu Legislatif secara nasional. Dalam situasi politik yang penting seperti itu, Pemda tidak diperbolehkan melakukan transaksi pengadaan tanah atau kegiatan lain yang membutuhkan dana cukup besar untuk menjaga agar kampanye berjalan secara baik dan Pemilu terselenggara secara jujur dan adil. Saleh Maktab harus melakukan kampanye tanpa dana dari transaksi tanah yang dia harapkan. Dia kalah dalam Pemilu dan posisinya diganti oleh tokoh yang lebih populer di Kukar yaitu Edimas Bardan.

Dengan berbekal data yang saya kirimkan, BPK ternyata menindaklanjuti kasus Loa Kulu dengan melakukan penyidikan lapangan. BPK selanjutnya mengangkat kasus ini sebagai temuan penting di Kabupaten Kukar. Belakangan, media sudah banyak menulis berita bahwa kasus korupsi pengadaan tanah untuk bandara Loa Kulu selanjutnya ditangani oleh KPK. Terdakwa utamanya adalah Bupati Syaukani HR, tetapi soal kerjasamanya dengan Saleh Maktab ternyata tidak banyak disebut. Modus operandi dalam kasus korupsi yang terdapat dalam berkas tuntutan KPK adalah penyalahgunaan APBD untuk membeli tanah seluas 256 hektare yang telah diputuskan pada tanggal 30 Juni 2003. Syaukani terbukti merugikan negara karena membeli tanah di Loa Kulu itu dari anak-anaknya sendiri senilai Rp15,36 miliar atau dengan harga sebesar Rp 6.000 per meter. Bukti korupsi tidak bisa dielakkan lagi karena ketiga anak Syaukani pada periode April 2003 hingga Februari 2004 membeli dengan harga hanya sebesar Rp 1.500 per meter. Badan Pengawas Daerah provinsi Kalimantan Timur menemukan adanya selisih pembelian sebesar Rp 11,52 miliar karena harga beli menurut NJOP (seperti yang juga dikuatkan oleh data dari Kantor Pelayanan Pajak) hanya sebesar Rp 3,84 miliar.

Karena dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi, Syaukani dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tipikor. Namun di tingkat kasasi, MA menambah vonis hukumannya menjadi 6 tahun. Bagi sebagian warga dan penegak hukum, hukuman itu mungkin sudah setimpal dengan pelanggaran yang telah dilakukannya sebagai pejabat puncak di Pemda Kukar. Namun bagi saya, hukuman atas tindak pidana korupsi itu belum impas dengan begitu besarnya uang rakyat yang telah disalahgunakan. Belakangan,

saya dan juga banyak rakyat Indonesia lebih kecewa karena Syaukani mendapatkan pengampunan dan remisi justru dari Presiden. Keputusan Presiden No 7/G tahun 2010 dikeluarkan oleh Presiden SBY yang memuat pengampunan Syaukani dengan potongan masa pidana tiga tahun. Surat keputusan itu juga memuat tentang remisi bagi Aulia Pohan, besan presiden yang menjadi terpidana dalam kasus penyalahgunaan BLBI.

Rakyat Kabupaten Kukar rupanya juga tidak tahu fakta yang sebenarnya tentang kasus korupsi itu. Terlebih lagi, dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, rakyat Kukar juga mudah lupa. Setelah Syaukani divonis penjara karena korupsi, elit politik di Golkar tidak mudah mendapatkan pengganti Bupati yang punya kemampuan memadai dan sekaligus diterima oleh rakyat. Sudah terbukti di pengadilan bahwa Syaukani dan keluarganya terlibat dalam banyak kasus korupsi, bukan hanya soal pengadaan tanah di Loa Kulu, tetapi juga penyalahgunaan dana sosial sebagai dana taktis, upah pungut di sektor minyak bumi dan gas, biaya perjalanan dinas, dan sebagainya. Menurut data dari ICW (Indonesian Corruption Watch) pada tanggal 20 September 2007, korupsi yang melibatkan keluarga Bupati itu mengakibatkan kerugian negara dengan total Rp 2,1 triliun.

Namun sekali lagi, ingatan rakyat kabupaten Kukar, dan mungkin kebanyakan rakyat di berbagai daerah lainnya, ternyata sangat pendek. Pada akhirnya pengadaan tanah untuk bandara Sultan Kutai Berjaya di Loa Kulu itu terlaksana. Yang saya dengar dari kawan-kawan sekerja saya di Pemda Kukar, banyak pihak yang memang ikut menikmati hasil transaksi yang dibiayai dari APBD itu, tidak terkecuali Kabid Prasarana Fisik yang menggantikan saya dan akhirnya memuluskan transaksi, para pejabat di Bappeda, dan para anggota DPRD. Setelah Syaukani melepaskan jabatannya sebagai Bupati dan juga kedudukannya sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar Kukar karena menjalani hukuman, dia pun tetap bisa melanggengkan dinasti politiknya di Kukar. Rita Widyasari, anak perempuannya yang kedua, ikut mencalonkan sebagai bupati pada periode 2009-2014 dan ternyata terpilih. Saya tidak tahu apakah nasib saya sebagai birokrat di provinsi Kaltim akan tetap menjadi sasaran tembak bagi para politisi di Kabupaten Kukar. Tetapi sebagai seorang beragama, saya hanya bisa berdoa bahwa apa yang saya lakukan ini diridhai oleh Allah dan berharap bahwa para politisi itu tidak akan mengejar saya yang sekarang tinggal menghabiskan karir sebagai birokrat di Pemprov untuk waktu sekitar 10 tahun lagi.
